

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian penulis yang berjudul “Strategi Kebijakan Luar Negeri Jerman dalam Merespons Ekstrateritorialitas Foreign Direct Product Rule (FDPR) Amerika Serikat pada Sektor Semikonduktor” menyimpulkan bahwa respons Jerman bukanlah reaksi tunggal yang bersifat reaktif, melainkan strategi kebijakan luar negeri yang berlapis dan sistematis. Ini dibuktikan dengan penolakan Jerman baik terhadap *de-coupling* penuh dari Tiongkok maupun keberpihakan mutlak kepada Amerika Serikat. Melalui kerangka analitis *de-risking* Brinza et al. (2024) dan *hedging* Kuik (2025), penelitian ini membuktikan bahwa Jerman memilih jalur tengah yang secara konseptual koheren dan secara empiris dapat diobservasi melalui kebijakan-kebijakan konkret yang diambil selama periode penelitian.

Tekanan FDPR yang diberlakukan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Amerika Serikat sejak Oktober 2022, mencakup *Advanced Computing FDP Rule*, *Supercomputer FDP Rule*, dan *Entity List FDP Rule* telah menciptakan dampak ekstrateritorial yang tidak bekerja semata-mata melalui sanksi eksplisit, melainkan melalui efek ketidakpastian regulasi yang mengubah perilaku institusional Jerman secara fundamental. Kasus SUSS MicroTec, di mana penigiriman mesin senilai €23,5 juta tertahan meskipun dasar hukum ekspor tidak berubah, membuktikan bahwa FDPR bekerja melalui mekanisme yang jauh lebih luas dari mandat hukum tertulisnya. Kasus Trumpf yang mengalami pengetatan pemeriksaan ekspor meskipun produk lasernya secara teknis berbeda dari kategori semikonduktor yang menjadi target FDPR, membuktikan bahwa efek tersebut telah merambat secara sistemik ke seluruh ekosistem teknologi tinggi Jerman. Dua kasus ini bersama-sama mengubah sifat permasalahan yang dihadapi Jerman dari masalah kontrol ekspor sektoral menjadi masalah kedaulatan ekonomi nasional yang memerlukan respons di level kebijakan luar negeri.

Proses pembentukan kebijakan respons Jerman dimulai dari pengakuan bahwa sistem tata kelola yang ada tidak memadai untuk menghadapi era

geoekonomi. Konflik internal *Ampelkoalition* antara pendekatan pragmatisme ekonomi SPD di bawah Scholz dan pendekatan idealisme berbasis keamanan Partai Hijau di bawah Baerbock dan Habeck menghasilkan *decision vacuum* yang dirasakan langsung oleh industri sebagai hambatan operasional. Kemacetan institusional di BAFA, yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi berhasil mendorong pemerintah Jerman meluncurkan tiga paket reformasi prosedural berturut-turut antara September 2023 dan April 2024. Reformasi-reformasi ini bukan penyelesaian substantif atas konflik strategis yang mendasar, melainkan respons manajerial jangka pendek yang memberikan kepastian prosedural bagi perusahaan sambil menunggu konsensus strategis yang lebih luas terbentuk. Pada Juli 2023, konsensus tersebut akhirnya diartikulasikan secara resmi melalui Strategi China pertama Jerman, sebuah dokumen kompromi yang mencerminkan tegangan internal koalisi namun sekaligus menetapkan *de-risking* sebagai pilihan berdaulat yang secara eksplisit menolak narasi *de-coupling* Amerika Serikat

Implementasi strategi respons Jerman berlangsung pada dua waktu yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam jangka pendek, Jerman mengoperasionalkan *hedging* melalui tiga komponen yang dapat diobservasi secara empiris. Pertama, netralitas aktif termanifestasi dalam cara Jerman merumuskan seluruh kebijakan kontrol ekspornya tanpa menyebut Tiongkok secara eksplisit sebagai target, berbeda dari Belanda dan Jepang yang bergabung dalam pakta trilateral dengan AS, sehingga Jerman dapat mempertahankan ruang diplomatik dengan kedua kekuatan besar secara bersamaan. Kedua, kompensasi adaptif termanifestasi melalui strategi *de-Americanization of supply chain* yang dijalankan oleh SUSS MicroTec melalui relokasi produksi ke Taiwan dan substitusi pemasok non-AS, serta oleh Merck melalui lokalisasi produksi di Tiongkok dan pembangunan megasite di Taiwan. Kedua hal ini merupakan tindakan yang mengurangi eksposur terhadap yurisdiksi ekstrateritorial FDPR tanpa menghentikan keterlibatan dengan pasar Tiongkok. Dalam jangka panjang, diversifikasi inklusif termanifestasi melalui pembangunan kemitraan bahan baku strategis dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan pada mineral kritis Tiongkok, serta melalui pembangunan kapasitas

produksi semikonduktor domestik Eropa melalui ESMC Dresden, Infineon Dresden, dan GlobalFoundries Dresden yang didukung oleh EU Chips Act.

Konsolidasi dari seluruh strategi hedging ini dicapai melalui platform kolektif Uni Eropa, dan inilah dimensi yang paling khas dari respons Jerman. Jerman tidak hanya menggunakan Uni Eropa sebagai kendaraan kebijakan, Jerman secara aktif merancang *EU Chips Act* dengan mendorong mekanisme *first-of-a-kind* yang memungkinkan subsidi ESMC dan perluasan lingkup ke *mature nodes* yang dibutuhkan industri otomotif nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Jerman merespons tekanan ekstrateritorial FDPR AS dalam periode 2022–2024 melalui strategi *hedging* sebagai mekanisme kebijakan dan menggunakan Uni Eropa sebagai platform konsolidasinya, sebuah respons yang secara halus menolak *de-coupling* karena keduanya sama-sama akan mengorbankan keseimbangan *hedging* yang justru menjadi inti dari respons Jerman.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan baik untuk pengembangan kajian akademis di bidang Hubungan Internasional maupun untuk kebutuhan praktis para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan teknologi. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penelitian selanjutnya serta panduan bagi para pengambil keputusan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini membuka beberapa agenda riset yang relevan bagi pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang geoekonomi, kebijakan luar negeri Eropa, dan penerapan teori hedging di luar konteks Asia-Pasifik.

Penelitian ini merekomendasikan agar studi lanjutan mengkaji sejauh mana konsep *hedging* yang selama ini dikembangkan dalam konteks negara-negara Asia Tenggara oleh Kuik (2016; 2021; 2025) dapat dioperasionalisasikan secara

sistematis pada konteks Eropa, khususnya dalam menghadapi tekanan geoekonomi yang bersumber dari rivalitas teknologi AS-Tiongkok. Penelitian ini telah membuktikan bahwa konsep tersebut relevan untuk kasus Jerman, namun diperlukan studi komparatif yang lebih luas yang melibatkan negara-negara anggota UE lainnya seperti Prancis, Belanda, dan lainnya untuk menguji apakah terdapat variasi dalam bentuk dan intensitas *hedging* yang dijalankan, serta faktor-faktor domestik apa yang menentukan perbedaan tersebut.

Lebih lanjut penelitian ini membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam tentang efektivitas *hedging* institusional melalui platform UE sebagai respons terhadap tekanan ekstrateritorial. Meskipun penelitian ini berargumen bahwa *EU Chips Act* berfungsi sebagai instrumen *hedging* kolektif yang efektif, evaluasi empiris yang lebih komprehensif tentang apakah *EU Chips Act* benar-benar berhasil mencapai target 20 persen pangsa produksi semikonduktor global pada 2030 dan apakah pencapaian tersebut berkorelasi dengan berkurangnya kerentanan negara-negara anggota terhadap tekanan ekstrateritorial AS masih sangat dibutuhkan dalam literatur. Studi longitudinal yang mengkaji periode 2025–2030 akan sangat berharga untuk mengisi kekosongan ini.

6.2.2 Saran Praktis

Selain menyumbang pada ranah teoretis, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis yang dapat menjadi rujukan esensial bagi para pembuat kebijakan, aparatur negara, maupun pelaku industri strategis di Jerman dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk menavigasi risiko operasional serta memitigasi kelemahan tata kelola pemerintahan ketika dihadapkan pada disrupsi yurisdiksi asing.

Penelitian ini memberikan pembelajaran berharga bagi Pemerintah Jerman mengenai urgensi pembenahan tata kelola institusional dalam merespons tekanan geoekonomi. Kasus tertahannya miliaran Euro nilai ekspor korporasi seperti SÜSS MicroTec dan Trumpf akibat fenomena *overcompliance* birokrasi menegaskan bahwa perpisahan kaku antara ranah ekonomi dan keamanan nasional dapat melahirkan *decision vacuum* (kekosongan keputusan) yang merusak stabilitas industri. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan disarankan untuk memperkuat

mekanisme koordinasi dan konsensus lintas kementerian (terutama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, dan Kementerian Keuangan) guna menjamin kepastian hukum yang cepat dan terukur bagi eksportir domestik tanpa harus mengorbankan standar keamanan.

Teruntuk Uni Eropa, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi European Semiconductor Board agar dapat berfungsi sebagai instrumen koordinasi kebijakan yang nyata, bukan sekadar forum konsultasi. Selain itu, UE perlu mengembangkan instrumen hukum yang lebih tegas untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari efek ekstrateritorial regulasi asing, khususnya dengan memperbarui *EU Blocking Statute* agar mencakup kontrol ekspor semikonduktor dalam konteks Tiongkok, sebuah kekosongan hukum yang terbukti sangat merugikan posisi tata kelola ekspor Jerman selama periode penelitian ini.

Tidak tertinggal untuk perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, penelitian ini memberikan pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada satu simpul teknologi tunggal baik AS maupun Tiongkok adalah kerentanan strategis yang tidak bisa dikelola secara reaktif. Strategi diversifikasi rantai pasok yang proaktif, pembangunan kemitraan teknologi dengan berbagai negara secara bersamaan, dan keterlibatan aktif dalam kerangka kebijakan regional yang memberikan legitimasi kolektif adalah langkah-langkah yang terbukti lebih efektif dari respons unilateral yang tergesa-gesa. Dalam konteks Indonesia yang tengah membangun ekosistem industri semikonduktor melalui hilirisasi nikel dan kobalt, pelajaran dari kasus Jerman tentang pentingnya platform institusional regional sebagai perisai diplomatik sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan industri strategis nasional.